



UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Tol. Ciawi No. 1 KotakPos 35 Bogor 16720 Tlp. (0251) 8240773 Fax. 8240985
<https://site.google.com/a/unida.ac.id/lppm>, surel: lppm@unida.ac.id

KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
Tahun Anggaran 2021
Nomor: 143/LPPM/K-X/VII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dra. Ginung Pratidina, M.Si.** : Direktur LPPM, Universitas Djuanda Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas yang berkedudukan Universitas Djuanda Bogor di Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35, Ciawi Bogor 16720 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ani Yumarni, S.H.I, M.H.** : Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021, dengan anggota I bernama Dr. Endeh Suhartini, SH.,MH., dan anggota II Mulyadi, SH., MH untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 dengan judul **“Optimalisasi Pengelolaan Aset Wakaf oleh Nazhir Perseorangan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat dalam UU Nomor Wakaf (Studi kewenangan BWI Kota Bogor dalam Pengawasan dan Pembinaan)”**.

Pasal 2

Dana Penelitian

Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 109.796.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** sudah termasuk pajak.

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021, Nomor SP DIPA- 023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

(1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x Rp. 109.796.000,-= **Rp. 76.857.200,-** (*tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang akan dibayarkan melalui dua termin oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Dengan rincian sebagai berikut:

Termin I setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.

Termin II setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.

Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp. 109.796.000,-= **Rp. 32.938.800,-** (*tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui dua termin kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut:

Termin III setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu laporan akhir.

Termin IV setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah luaran penelitian yang dijanjikan ke SIMLITABMAS dan menyerahkan ke LPPM yaitu poster, banner, buku ajar, artikel untuk jurnal LPPM dan bukti submit artikel ke jurnal lain jika ada.

- a. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan Daftar luaran tambahan penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 18 Maret 2021** dan berakhir pada **Tanggal 16 November 2021**.

Pasal 5

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa :
 - a. Artikel pada Conference/Seminar Internasional di Pengindeks Bereputasi : Terbit dalam Prosiding;
 - b. Artikel pada Conference/Seminar Internasional di Pengindeks Bereputasi : Terbit dalam Prosiding;
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan untuk mencapai target luaran tambahan penelitian berupa:
 - a. Poster : Telah Bersertifikat;

- (3) Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) : disesuaikan dengan skema penelitian
- (4) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran wajib dan luaran tambahan penelitian yang telah ditetapkan;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul “**Optimalisasi Pengelolaan Aset Wakaf oleh Nazhir Perseorangan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat dalam UU Nomor Wakaf (Studi kewenangan BWI Kota Bogor dalam Pengawasan dan Pembinaan)**”, dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS **paling lambat 18 September 2021**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan bagi peneliti tahun pertama dan mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2021** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 016/SP2H/RT-JAMAK/LL4/2021

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 9 **Penilaian Luaran**

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 11 **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan dibayarkan secara kolektif oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Djuanda Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat,

dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Kewajiban Hilirisasi Luaran

Peneliti wajib melakukan hilirisasi luaran baik luaran wajib maupun luaran tambahan hasil risetnya yang inventornya periset dan pemegang hak ciptanya adalah Universitas Djuanda Bogor yang di HKI kan melalui sentra KI Universitas Djuanda Bogor.

Pasal 18
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dra. Ginung Pratidina, M.Si
NIDN: 0019056701

PIHAK KEDUA



Ani Yumarni, S.H.I, M.H.
NIDN: 0428018301

Saksi :

1. Ridwan Irawansyah, S.Sos., M.AP.

(.....)

2. Nurul Suci Fatimah, S.Pd.



(.....)



(.....)

dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Kewajiban Hilirisasi Luaran

Peneliti wajib melakukan hilirisasi luaran baik luaran wajib maupun luaran tambahan hasil risetnya yang inventornya periset dan pemegang hak ciptanya adalah Universitas Djuanda Bogor yang di HKI kan melalui sentra KI Universitas Djuanda Bogor.

Pasal 18
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dra. Ginung Pratidina, M.Si
NIDN: 0019056701

PIHAK KEDUA



Ani Yumarni, S.H.I, M.H.
NIDN: 0428018301

Saksi :

1. Ridwan Irawansyah, S.Sos., M.AP.

(.....)

2. Nurul Suci Fatimah, S.Pd.

(.....)